

PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN NEGARA BERKEMBANG LAINNYA : SEBUAH STUDI KOMPARASI

Anna Widiastuti

Abstract

Education system keeps changing till nowadays, not only in developed countries, but also in developing countries. Changing in education system involves tools and equipments used also. The implementation of high technology as equipments and tools in education is a need as the speed increased used of technology. There are so many human resources marked "professional and intelektual" as a result of the education process. In relation with this fact, has the education process already succeeded? How is the education system in Indonesia? Has it already succeeded as well? This paper describes today's education system in Indonesia, by providing data and observing the problems.

Key words: *Education system, problems in education, comparative studies in education.*

Pendahuluan

Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya material, merupakan faktor yang paling menentukan dari karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Di mana mekanisme kelembagaan pokok dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan manusianya adalah melalui sistem pendidikan formal.

Akan tetapi penciptaan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif *bukan merupakan kunci utama* dalam mensukseskan pembangunan nasional. Sebagai gambarnya, setelah hampir tiga dasawarsa lamanya, perluasan kesempatan bersekolah secara cepat dengan menelan biaya hingga ratusan miliar dolar telah terlaksana, tetapi kondisi dasar rata-rata penduduk diberbagai negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Kemiskinan absolut justru semakin parah dan tersebar luas di mana-mana. Jurang kesenjangan kemakmuran antara penduduk kaya dan penduduk miskin terus-menerus melebar dari tahun ke tahun. Proporsi pengangguran, baik yang terbuka maupun yang tidak kentara terus melonjak. Dan yang paling menyedihkan adalah jumlah penganggur yang "*terdidik*" di berbagai negara Dunia Ketiga semakin bertambah banyak.

Gambaran di atas bukan berarti bahwa sistem pendidikan formal (*formal education system*) telah gagal dan menjadikannya penyebab dari permasalahan-permasalahan yang timbul, akan tetapi mungkin kita terlalu berlebihan dalam menanggapi serta mengartikan untuk selalu bertindak dan bersikap positif yang serba "*modern*" tanpa memperhitungkan segala kelemahan dan dampak negatifnya. Karena peran pendidikan formal tidaklah terbatas pada memberikan pengetahuan dan keahlian kepada masing-masing individu untuk dapat bekerja sebagai agen

perubahan ekonomi (*economic change agent*) yang baik bagi masyarakatnya tetapi juga menanamkan tata nilai yang serba luhur, norma/etika cita-cita tingkah laku serta aspirasi yang selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa yang bersangkutan.

Pendidikan Di Negara – Negara Berkembang Dan Indonesia

Untuk menggambarkan sudah berhasilkah sistem pendidikan yang berlangsung di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, perhatikan kita akan menitik beratkan pada masalah tingkat pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, rasio penduduk usia sekolah yang bersekolah (*enrollment*), tingkat buta huruf, tingkat putus sekolah serta perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan dengan perbandingan antara data-data Indonesia dan data-data negara-negara berkembang lainnya.

Pengeluaran Pemerintah Untuk Bidang Pendidikan

Tingkat pengeluaran pemerintah di negara-negara berkembang untuk bidang pendidikan di era 1970-an sangat besar. Angka persentase anggaran pendidikan terhadap pendapatan nasional maupun terhadap anggaran belanja nasional meningkat pesat. Sebagai gambaran di negara-negara Asia, total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan telah meningkat tiga kali lipat selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Sedangkan di kawasan Afrika dan Amerika Latin pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan selama periode tersebut meningkat lebih dari dua kali lipatnya, di mana kenaikan tersebut melebihi dari kenaikan pengeluaran untuk sektor manapun dalam perekonomiannya. Sampai dengan awal dasawarsa 1990-an anggaran pendidikan di berbagai negara Dunia Ketiga telah menyerap sekitar 15% sampai 27% dari total pengeluaran pemerintah. Tetapi secara numeric, jumlah pengeluaran tersebut masih sedikit (bila dibandingkan dengan negara-negara maju) yaitu mencapai US \$ 229 per kapita pertahunnya. Sementara untuk negara-negara maju biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah mencapai US \$ 468 atau dua kali lipat lebih tinggi dari negara berkembang.

Untuk kasus di Indonesia sendiri, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangatlah besar dan akan selalu membutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya. Kita ambil salah satu contoh (sebagai gambaran kita) tentang berapa besarnya pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan ini, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan buku setiap pergantian tahun ajaran. Di bawah ini kita ambil contoh pengadaan buku untuk pendidikan dasar dan menengah.

Program pemerintah dalam hal pengadaan buku ini sudah dimulai sejak tahun 1980-an, di mana pemerintah sudah berupaya keras menyisihkan uang anggaran belanja untuk membeli buku pelajaran yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Target program ini adalah satu buku untuk satu siswa, dengan tujuan untuk membantu sistem pembelajaran siswa baik di sekolah maupun di rumah. Tak heran jika pemerintah selalu “ngotor” mewujudkan program ini. Data menunjukkan untuk wilayah D.K.I. Jakarta saja suatu proyek tentang pengadaan buku pendidikan dan pengajaran tingkat menengah yang diadakan Depdiknas pada tahun anggaran 2003 sesuai dengan persetujuan Daftar Isian Proyek (DIP) membutuhkan dana sekitar ± Rp. 3,889 Milliar, sedangkan untuk tingkat dasar dana yang dianggarkan sekitar ± Rp. 13,139 Milliar (*Kompas*, 11 September 2003).

Bagi suatu negara seperti Indonesia, angka di atas bukanlah jumlah yang kecil untuk dikeluarkan, masih ada berbagai macam sektor yang masih harus dipenuhi dengan sejumlah anggaran yang tersedia.

Proporsi Bersekolah (*Enrollment*)

Pada periode antara tahun 1960 dan 1990 jumlah total murid yang masuk sekolah di masing-masing dari tiga tingkatan utama pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) di berbagai negara berkembang di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin telah melonjak sekitar dari 163 juta orang menjadi 440 juta orang, yaitu ada kenaikan sekitar 5% per tahun. Walaupun bagian yang paling besar atas jumlah tersebut terjadi pada tingkat sekolah dasar, namun proporsi kenaikan terbesar justru terjadi pada tingkat sekolah menengah serta perguruan tinggi, yang masing-masing mencapai 12,7% dan 14,5% per tahun. Meskipun demikian proporsi jumlah murid sekolah dasar masih sekitar 78% dari total murid yang terdaftar dalam sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Data mengenai rasio antara jumlah anak usia sekolah dan rasio penduduk usia sekolah yang benar-benar bersekolah (*enrollment ratios*), baik pada tingkat sekolah dasar, menengah maupun tingkat tinggi pada negara-negara Dunia Ketiga serta negara maju sebagai perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Rasio Anak Bersekolah dari Total Anak Usia Sekolah Disejumlah Negara Berkembang Pada Tingkatan Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi, Untuk Tahun 1992 dan Tahun 1965 Sebagai Perbandingan (dalam Persentase)

Negara Tahun	Rasio Anak Bersekolah sebagai Persentase Usia Sekolah					
	Sekolah Dasar		Menengah		Sekolah Tinggi	
	1965	1992	1965	1992	1965	1992
Negara Berkembang Berpenghasilan Rendah						
Bangladesh	49	77	13	19	1	4
Ethiopia	11	22	2	12	0	1
Haiti	50	56	5	22	0	1
India	74	100	27	44	5	6
Sri Lanka	93	100	35	74	2	6
Tanzania	32	68	2	5	0	1
Negara Berkembang Berpenghasilan Menengah						
Kolombia	84	100	17	55	3	15
Kolombia	50	79	8	28	2	9
Guatemala	92	100	17	55	4	14
Meksiko	100	100	41	74	19	28
Filipina	100	100	35	90	6	42
Korea Selatan	78	97	14	33	2	19
Thailand	100	100	61	93	21	51
Negara-negara Maju						

- Sumber 1. World Bank, *World Development Report*, 1992 dan 1995 (New York: Oxford University Press, 1992 dan 1995), annex Tabel 28.
2. Statistik Indonesia, BPS 2001

Dari data di atas, kita bisa mengetahui telah terjadi peningkatan atas jumlah anak-anak yang bersekolah pada perbandingan periode yang bersangkutan khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tetapi sayangnya jumlah siswa atau pelajar yang harus bersekolah sampai masa pendidikan benar-benar selesai (sampai tamat) atau tidak ada yang berhenti di tengah jalan (dengan alasan tertentu).

Di negara Indonesia sendiri, salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, yaitu dengan mencanangkan berbagai program, seperti : program wajib belajar, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dan lain-lain. Melalui program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi ini.

Dari data hasil sensus nasional tahun 2001 penduduk usia sekolah yang berumur 7–24 tahun ada sebanyak 71,8 juta orang. Dari seluruh penduduk tersebut ada sebanyak 43.050.573 orang yang berstatus masih sekolah, yaitu terdiri dari 22.259.852 orang laki-laki dan 20.790.721 orang perempuan.

Pada tabel 2, disajikan data mengenai penduduk usia 7 – 24 tahun yang masih bersekolah menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Lebih dari 50% penduduk yang masih sekolah berada pada kelompok umur 7 – 12 tahun. Dibandingkan tahun 2000, jumlah penduduk berumur 7 – 12 tahun yang masih mengalami peningkatan pada tahun 2001, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pada kelompok umur lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2
Penduduk Usia 7 – 4 Tahun yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 1997 – 2001

Jenis Kelamin & Kelompok Umur*	1997**	1998	1999	2000 ¹⁾	2001 ²⁾
Laki-laki					
7 – 12	13.505.765	13.461.207	13.312.954	12.194.560	12.663.627
13 – 15	5.663.687	5.545.104	5.586.068	5.176.741	4.940.218
16 – 18	3.323.155	3.405.063	3.617.461	3.412.339	3.286.462
19 – 24	1.308.451	1.349.982	1.461.022	1.448.594	1.369.545
Perempuan					
7 – 12	12.742.214	12.560.853	12.397.179	11.573.342	11.931.928
13 – 15	5.235.870	5.251.246	5.324.502	4.876.403	4.753.432
16 – 18	3.069.081	3.142.603	3.431.493	3.169.633	2.980.305
19 – 24	1.070.175	1.104.140	1.234.159	1.142.019	1.125.056
Laki-laki+Perempuan					
7 – 12	26.247.979	26.022.060	25.710.133	23.767.902	24.595.555
13 – 15	10.899.557	10.796.350	10.910.570	10.053.144	9.693.650
16 – 18	6.392.236	6.547.666	7.048.954	6.581.972	6.266.767
19 – 24	2.378.626	2.454.122	2.695.181	2.590.613	2.494.601

Catatan : *) Tidak termasuk DI Aceh dan Maluku / *Excluding DI Aceh and Maluku*

***) Tidak termasuk DI aceh / *Ecluding DI Aceh*

Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2001

Kemampuan Baca Tulis (*Literacy*)

Sejak tahun 1980, persentase penduduk dewasa (dalam hal ini usia 15 tahun ke atas) yang buta huruf di negara-negara berkembang telah menurun dari 60% pada tahun 1960 menjadi 36% di tahun 1990. Namun, sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, jumlah absolut penduduk dewasa yang buta huruf dalam periode yang sama justru semakin meningkat dari sekitar 120 juta jiwa di tahun 1960 menjadi lebih dari 940 juta jiwa pada tahun 1990. Tingkat buta huruf penduduk di daerah pedesaan yang paling tinggi ditemukan di negara-negara Afrika (sekitar 50%), negara-negara Arab (45%), disusul oleh Asia Selatan (45%), Asia timur (24%) dan Amerika Latin (15%). Di Amerika Utara dan Eropa, tingkat buta huruf penduduk dewasanya masing-masing hanya sekitar 1,0% dan 2,5%.

Kasus di Indonesia, penurunan jumlah penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur di luar 7 – 12 tahun (seperti yang sudah dijelaskan pada sub di atas) berpengaruh terhadap penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Hal ini bisa disimak pada tabel 3. Dari data tersebut dijelaskan bahwa persentase penduduk yang buta huruf mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2001 jika dibandingkan dengan tahun 2000. peningkatan persentase penduduk buta huruf terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi seperti ini terjadi pada semua kelompok umur kecuali pada kelompok umur 30 – 34 tahun.

Tabel 3

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal 2000 - 2001

Golongan Umur	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	2000 ¹⁾	2001 ²⁾	2000 ¹⁾	2001 ²⁾	2000 ¹⁾	2001 ²⁾
10 – 14	0.51	0.69	1.66	2.14	1.22	1.56
15 – 19	0.49	0.71	1.96	2.33	1.31	1.58
20 – 24	0.62	0.76	3.04	3.04	1.86	1.91
25 – 29	0.87	1.06	4.27	4.39	2.7	2.84
30 – 34	2.13	2.12	7.22	7.08	4.93	4.81
35 – 39	3.53	4.16	11.51	12.09	8.16	8.57
40 – 44	4.83	6.09	15.49	16.10	10.89	11.69
45 – 49	5.89	7.24	18.22	19.12	13.03	14.04
50 +	22.24	24.3	41.59	43.60	34.02	36.01
Jumlah	5.36	5.99	13.62	14.43	10.08	10.73

Catatan : 1) Tidak termasuk DI Aceh dan Maluku / *Excluding DI Aceh and Maluku*

2) Tidak termasuk DI aceh / *Ecluding DI Aceh*

Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2001

Sarana Pendidikan

Pada tabel 4 sampai 6 disajikan data mengenai jumlah murid, sekolah dan tenaga pendidik atau guru dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMU dan SMK) yang bersumber dari Depdiknas. Pada tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2000/2001 terjadi peningkatan jumlah murid dibandingkan dengan tahun ajaran 1999/2000. Sedangkan untuk jumlah sekolah dan guru mengalami penurunan. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) terjadi peningkatan jumlah guru, sedangkan jumlah sekolah dan murid mengalami penurunan. Pada tingkat sekolah menengah umum (SMU) terjadi penurunan jumlah guru, sedangkan jumlah sekolah dan murid mengalami peningkatan. Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), baik jumlah murid, guru maupun sekolah mengalami peningkatan.

Sedangkan pada tabel 7 menyajikan data jumlah perguruan tinggi, mahasiswa dan tenaga edukatif baik negeri maupun swasta pada tahun 2000/2001. Jumlah mahasiswa terdaftar pada perguruan tinggi swasta sekitar 1.802.152 orang, masih lebih banyak jika dibandingkan dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri yang hanya sekitar 816.552 orang (data ini tidak termasuk mahasiswa Universitas Terbuka). Begitu pula dengan jumlah perguruan tinggi, mahasiswa maupun tenaga edukatif, lebih banyak pada perguruan tinggi swasta dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri.

Pada tabel 8 menggambarkan tentang partisipasi penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam bersekolah. Data pada tabel menunjukkan dari 100 penduduk pada tahun 2001 ada sekitar 25 orang yang berstatus masih bersekolah, 62 orang yang pernah bersekolah dan 13 orang penduduk yang belum pernah sekolah. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah bersekolah di daerah pedesaan cukup tinggi (sekitar 16,60%) terutama pada kelompok umur 35 tahun ke atas.

Tabel 7**Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Edukatif Negeri dan Swasta di bawah Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Menurut Provinsi 2000 / 2001**

Provinsi	Jumlah Perguruan Tinggi		Jumlah Mahasiswa		Jumlah Tenaga Edukatif	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Dista Aceh	2	42	20.540	30.796	1.469	2.593
Sumatera Utara	3	114	35.554	128.418	2.543	10.748
Sumatera Barat	5	53	26.016	49.877	2.512	5.114
Riau	1	31	13.179	19.276	910	1.247
Jambi	1	10	6.540	6.414	625	753
Sumatera Selatan	2	73	18.759	44.230	1.361	4.170
Bengkulu	1	13	9.616	6.790	577	550
Lampung	2	49	18.099	23.892	1.006	1.798
D.K.I. Jakarta	4	254	174.136	401.408	4.118	31.824
Jawa Barat	7	226	86.368	204.698	6.391	18.534
Jawa Tengah	6	148	80.331	156.584	5.120	9.969
D.I. Yogyakarta	3	80	47.343	166.555	3.481	9.312
Jawa Timur	10	221	88.310	332.648	6.251	21.769
Bali	4	24	18.959	17.671	2.209	2.562
Nusa Tenggara Barat	1	18	9.429	14.572	771	2.471
Nusa Tenggara Timur	3	8	8.466	14.673	859	383
Kalimantan Barat	2	18	13.277	15.630	883	1.042
Kalimantan Tengah	1	19	8.344	7.251	606	932
Kalimantan Selatan	2	17	9.463	20.604	919	1.549
Kalimantan Timur	3	33	13.976	18.378	938	1.642
Sulawesi Utara	4	34	28.923	11.569	2.991	2.183
Sulawesi Tengah	1	14	11.682	7.428	922	1.463
Sulawesi Selatan	4	106	37.390	75.969	2.770	7.066
Sulawesi Tenggara	1	12	13.879	4.939	589	590
Maluku	2	29	8.530	7.882	880	727
Irian Jaya	1	25	9.443	14.000	519	864
Indonesia	76	1.671	816.552	1.802.152	52.220	141.855

Sumber : 1. Departemen Pendidikan Nasional
2. Statistik Indonesia, BPS 2001

Biaya Dan Hasil

Akhir-akhir ini semakin banyak kritik yang dilancarkan terhadap kenyataan kian timpangnya biaya-biaya pendidikan dalam berbagi tingkat pendidikan di negara-negara berkembang, tak terkecuali untuk Indonesia sendiri. Ketidakseimbangan tersebut nampak semakin jelas apabila kita juga membandingkan biaya pendidikan pada tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi di satu sisi dengan tingkat sekolah dasar pada sisi yang lain. Pemerintah negara-negara berkembang sendiri selama ini terlalu menitikberatkan pengembangan pendidikan tinggi dan secara relatif kurang memperhatikan pengembangan pada pendidikan dasar dan menengah. Investasi yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah kurang efisien. Dana-dana yang dikeluarkan tersebut mungkin akan lebih produktif apabila ditanamkan dalam pengembangan sekolah dasar. Namun hal ini tidak harus ditafsirkan bahwa sekolah dasar harus lebih diutamakan daripada perguruan tinggi, karena hal itu ditentukan oleh prospek ketenagakerjaan bagi masing-masing jenjang pendidikan pada masa-masa selanjutnya.

Menurut Behrman dan Birdsall melalui penelitian yang dilakukannya telah membuktikan bahwa yang paling menentukan rasio pendapatan (*produktivitas*) dengan pendidikan bukanlah panjang pendeknya masa belajar, melainkan kualitas pendidikan (yaitu : mutu pengajaran, kecukupan fasilitas dan kecermatan kurikulumnya). Dengan artian, pemerintah harus memusatkan anggarannya untuk meningkatkan mutu sekolah yang ada, dengan lebih mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya di atas kuantitasnya.

Hasil penelitian di atas kemungkinan ada benarnya juga. Dan, kita semua mungkin juga mau mengakui bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini belum memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Segelintir pihak yang mau melibatkan diri dalam ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Ibarat jumlahnya bisa kita hitung dengan jari.

Sumber menyebutkan, contohnya di Jawa Tengah sendiri yang memiliki lima perguruan tinggi negeri (belum kalau ditambah dengan perguruan tinggi swasta). Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai propinsi dengan perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia. Tetapi, keberadaan perguruan tinggi negeri tersebut ternyata belum memberikan arti bagi perekonomian daerah. Padahal setiap universitas pada umumnya memiliki lembaga penelitian dengan berbagai pusat penelitian serta mempunyai Lembaga Pengabdian Masyarakat. (Kompas, Juli 2003)

Setelah lima tahun mengalami krisis multidimensi, Universitas di Indonesia tidak ada yang melakukan upaya memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah berdasarkan studi multidisiplin dan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang muncul justru berbagai bentuk kritik, komentar, protes dan demonstrasi yang mengatasnamakan kampus, baik dari kalangan mahasiswa ataupun "oknum" perseorangan. Apakah sikap demikian yang akan kita sebut sebagai "hasil" dari sistem pendidikan ? Masih adakah sikap-sikap yang rasional untuk meluruskan kembali asal tujuan dari sistem pendidikan yang sudah dijalankan.

Pentingnya Peranan Pemerintah

Pemerintah dan semua pihak yang terkait harus berupaya keras mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena pemerintah melalui departemen dan instansi yang terkait merupakan operator

urusan negara, jadi tidaklah proporsional jika negara dan pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam menyediakan anggaran pendidikan. Bahkan pemerintah hendaknya menjadikan pendidikan sebagai prioritas anggaran negara, karena pendidikan adalah salah satu cara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam kebijakan suatu negara. Di Indonesia mungkin bisa dicontohkan di sini mengenai kebijakan pemerintah dalam hal aturan subsidi silang untuk perguruan tinggi negeri, berbagai bentuk beasiswa untuk yang tidak mampu dan lain-lain.

Melihat pentingnya peranan pemerintah di bidang pendidikan ini, bisa kita lihat dari segi penawaran dan segi permintaan. Keseluruhan jasa dan fasilitas di bidang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dari segi penawarannya biasanya dibatasi oleh kemampuan dari suatu negara yang bersangkutan melalui anggaran yang disediakan untuk sektor pendidikan. Sedangkan kalau dilihat dari segi permintaan, hal ini berkaitan dengan individu yang menjalankan (*siswanya*).

Ada 2 hal yang diharapkan dari pihak individu dari apa yang ditawarkan selama ini oleh pemerintah, dan hal ini merupakan faktor yang paling mendasar, antara lain :

- 1) Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan asumsi nantinya mendapatkan penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang.
- 2) Biaya-biaya pendidikan (sekolah) yang ditanggung selama ini nantinya mendapatkan "timbal balik" sesuai yang sudah dikeluarkan.

Tapi kenyataannya, apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan, benarkah ?

Kesimpulan

Berbicara mengenai masalah yang ada di dunia pendidikan memang tidak bisa untuk diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Untuk negara-negara maju yang umumnya mempunyai penduduk berpendapatan tinggi, mungkin tidak mengalami kesukaran dalam melakukan investasi di bidang pendidikan. Para individu di negara maju telah mempunyai dorongan untuk mengeluarkan sebagian dari pendapatannya untuk investasi pendidikan yang tinggi atau mahal, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan investasi di bidang pendidikan terlalu banyak. Dalam hal ini mungkin pemerintah hanya perlu membuat kebijakan kurikulum untuk mengatur sektor pendidikan.

Berbeda kalau kita bandingkan untuk negara-negara berkembang. Banyak individu-individu yang masih sibuk untuk memikirkan bagaimana akan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dianggap sebagai kebutuhan dasar. Mereka tidak memiliki banyak pendapatan untuk disisihkan bagi biaya pendidikan. Dari sinilah pemerintah dituntut untuk lebih aktif melakukan investasi pendidikan. Andil pemerintah di sini dapat dalam bentuk sekolah cuma-cuma, beasiswa bagi rakyat yang tidak mampu dan mungkin pembebasan sebagian biaya pendidikan. Atau bisa ditambahkan kebijakan eksternal dari pemerintah di bidang pendidikan dapat berupa : kebijakan ke arah perbaikan dengan upaya penyempurnaan sistem pendidikan agar lebih sesuai dengan kepentingan pembangunan dan perubahan pola penempatan pekerjaan berdasarkan ijazah (walaupun sulit dilakukan). Dan kebijakan internal dari pemerintah dapat berupa : anggaran pendidikan subsidi, penyesuaian kurikulum dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Agus Imam Solihin. 1995. "Investasi Modal Manusia Melalui Pendidikan : Prntingnya Peran Pemerintah." *Jurnal Mini Economica*.
- Emmanuel Subangun. 2001. "Pendidikan Untuk Pasar atau Bisnis Dalam Pendidikan." *Jurnal Administrasi & Bisnis*.
- Kompas, Juli 2003.
- Mudrajat Kuncoro. -. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 2, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid 1 terjemahan, Edisi enam, Erlangga, Jakarta.
- Statistik Indonesia, BPS 2001.

Tabel 4

Sekolah, guru dan murid sekolah (sd) di bawah lingkungan departemen pendidikan nasional, menurut provinsi
Number of schools, teachers and students in primary school under the department of national education by province (1998/1999/2000/2001)

Provinsi Province (1)	Sekolah / Schools			Guru / Teachers			Murid / Students		
	1998/1999 (2)	1999/2000 (3)	2000/2001 (4)	1998/1999 (5)	1999/2000 (6)	2000/2001 (7)	1998/1999 (8)	1999/2000 (9)	2000/2001 (10)
Dista Aceh	3.220	3.225	3.219	25.354	25.462	25.525	595.624	589.284	580.932
Sumatera Utara	9.452	9.519	9.526	77.113	75.464	72.200	1.808.742	1.788.060	1.767.956
Sumatera Barat	4.225	4.224	4.306	31.049	30.501	30.962	666.214	646.733	630.362
Riau	3.514	3.621	3.645	27.341	28.259	29.150	670.295	691.078	717.451
Jambi	3.299	2.299	2.309	18.175	18.187	18.258	365.515	363.443	361.343
Sumatera Selatan	5.808	5.809	5.806	47.173	46.900	48.451	1.110.401	1.086.649	1.059.907
Bengkulu	1.448	1.426	1.439	11.563	11.617	11.380	228.110	225.580	224.171
Lampung	4.561	4.614	4.744	43.764	43.927	44.463	1.026.303	1.030.325	1.032.317
D.K.I. Jakarta	3.258	3.179	3.145	35.217	34.802	33.691	824.515	813.553	810.240
Jawa Barat	25.458	25.445	23.820	174.472	175.969	167.849	5.161.544	5.325.030	4.465.222
Jawa Tengah	21.694	21.533	21.362	167.237	164.343	162.562	3.668.351	3.622.028	3.574.163
D.I. Yogyakarta	2.328	2.304	2.253	19.718	19.361	18.788	295.883	300.167	294.876
Jawa Timur	22.408	22.333	22.142	169.544	167.583	167.117	3.269.960	3.225.045	3.207.768
Bali	2.695	2.701	2.707	22.172	22.075	21.887	335.751	337.884	342.428
Nusa Tenggara Barat	2.855	2.867	2.878	22.469	22.316	22.162	569.483	575.554	580.685
Nusa Tenggara Timur	3.979	4.061	4.078	25.713	26.280	28.151	611.012	613.140	617.012
Timor Timur	784	-	-	6.641	-	-	166.153	-	-
Kalimantan Barat	3.807	3.858	3.883	27.901	28.004	27.374	612.651	619.807	623.317
Kalimantan Tengah	2.515	2.591	2.675	16.856	18.259	20.057	260.708	265.094	267.554
Kalimantan Selatan	2.973	2.979	2.976	22.776	22.250	21.697	373.218	376.585	382.642
Kalimantan Timur	2.075	2.047	2.060	16.642	17.044	16.881	336.604	345.318	355.284
Sulawesi Utara	2.980	2.994	2.966	25.255	22.970	23.150	363.354	351.804	342.885
Sulawesi Tengah	2.449	2.499	2.517	16.899	16.767	16.500	318.013	315.372	312.110
Sulawesi Selatan	7.438	7.481	7.434	55.346	55.445	51.976	1.077.163	1.105.580	1.139.410
Sulawesi Tenggara	1.844	1.946	1.978	13.724	13.654	13.793	296.557	305.667	302.587
Maluku	2.662	2.679	2.688	17.053	17.196	17.918	364.434	365.587	360.728
Irian Jaya	2.313	2.378	2.408	15.369	16.533	16.533	311.435	330.469	348.208
Indonesia	151.042	150.612	148.964	1.152.536	1.141.168	1.128.475	25.687.893	25.614.836	25.701.558

Sumber: 1. Sejak September 1999 tidak termasuk Timor Timur / Since September 1999 excluding Timor Timur

Source 2. Departemen Pendidikan Nasional/ Ministry National Education

3. Statistik Indonesia, BPS 2001

Tabel 5

Sekolah, guru dan murid sekolah lanjutan tingkat pertama (sltp) di bawah lingkungan departemen pendidikan nasional, menurut provinsi
Number of schools, teachers and students in general junior secondary school under the department of national education by province
 (1998/1999/2000/2001)

Provinsi Province	Sekolah / Schools			Guru / Teachers			Murid / Students		
	1998/1999 (2)	1999/2000 (3)	2000/2001 (4)	1998/1999 (5)	1999/2000 (6)	2000/2001 (7)	1998/1999 (8)	1999/2000 (9)	2000/2001 (10)
Distri Aceh	533	509	512	11.254	10.867	10.501	162.089	154.367	157.094
Sumatera Utara	1.659	1.704	1.710	33.988	34.350	33.112	564.167	568.335	573.719
Sumatera Barat	445	446	450	13.610	13.485	13.362	188.223	190.095	191.857
Riau	499	505	494	9.261	9.609	9.516	154.961	159.778	158.498
Jambi	314	313	311	5.673	5.878	5.681	84.162	86.837	89.727
Sumatera Selatan	927	915	883	19.076	17.864	16.557	296.312	303.333	305.851
Bengkulu	204	202	195	3.987	3.977	3.672	66.078	69.224	69.060
Lampung	897	498	905	16.771	16.580	16.810	272.214	270.999	274.855
D.K.I. Jakarta	1.092	1.086	1.054	27.321	26.412	25.133	433.353	400.871	393.208
Jawa Barat	2.558	2.602	2.645	62.502	62.407	67.473	1.032.578	1.320.209	1.337.866
Jawa Tengah	2.698	2.723	2.662	64.557	61.827	63.483	1.210.116	1.229.480	1.165.670
D.I. Yogyakarta	481	474	451	12.628	11.961	11.307	158.833	160.293	155.437
Jawa Timur	2.955	2.987	2.929	71.767	69.544	68.811	1.172.543	1.187.383	1.184.133
Bali	373	334	304	9.559	9.742	9.434	134.171	131.183	123.219
Nusa Tenggara Barat	265	265	262	6.709	7.135	6.967	110.404	119.183	126.393
Nusa Tenggara Timur	554	555	564	7.877	8.487	8.445	127.369	135.290	140.504
Timor Timur	119	-	-	1.963	-	-	30.941	-	-
Kalimantan Barat	566	546	557	8.136	7.558	7.832	132.391	134.384	138.629
Kalimantan Tengah	328	325	327	3.734	4.159	4.186	58.909	6.974	61.430
Kalimantan Selatan	322	312	320	5.723	5.635	5.972	82.215	80.071	80.746
Kalimantan Timur	327	333	336	6.690	6.305	7.016	103.441	104.554	109.633
Sulawesi Utara	555	554	560	8.967	8.435	8.412	108.090	110.636	111.187
Sulawesi Tengah	315	309	319	5.434	5.322	5.087	67.393	69.854	70.767
Sulawesi Selatan	940	945	913	19.159	18.469	18.378	288.749	296.542	299.246
Sulawesi Tenggara	247	249	248	4.310	4.396	4.896	77.995	82.424	86.102
Maluku	465	451	467	6.377	5.602	6.088	98.652	94.494	96.163
Irian Jaya	322	328	343	5.411	5.168	5.012	78.329	79.300	83.713
Indonesia	20.960	20.866	20.721	452.444	441.174	443.143	7.564.628	7.600.093	7.584.707

Sumber: 1. Sejak September 1999 tidak termasuk Timor Timur / Since September 1999 excluding Timor Timur

Source 2. Departemen Pendidikan Nasional/ Ministry National Education

3. Statistik Indonesia, BPS 2001

Tabel 6

Sekolah, guru dan murid sekolah menengah umum (smu) di bawah lingkungan departemen pendidikan nasional, menurut provinsi
Number of schools, teachers and students general senior secondary school under the department of national education by province
 (1998/1999/2000/2001)

Provinsi Province	Sekolah / Schools			Guru / Teachers			Murid / Students		
	1998/1999 (2)	1999/2000 (3)	2000/2001 (4)	1998/1999 (5)	1999/2000 (6)	2000/2001 (7)	1998/1999 (8)	1999/2000 (9)	2000/2001 (10)
Dista Aceh	206	205	213	5.588	5.859	6.099	72.271	67.375	70.278
Sumatera Utara	681	672	678	17.733	17.702	16.397	229.590	243.929	243.859
Sumatera Barat	185	189	194	7.237	7.341	7.209	86.458	91.355	95.909
Riau	169	176	175	4.541	4.621	4.416	62.442	69.236	70.178
Jambi	118	117	114	2.514	2.658	2.703	32.869	34.844	35.768
Sumatera Selatan	343	342	346	8.429	8.856	8.723	122.881	125.067	127.131
Bengkulu	79	78	78	1.963	2.003	1.971	27.430	29.190	31.264
Lampung	278	266	257	7.485	7.648	7.350	79.876	81.368	78.103
D.K.I. Jakarta	490	486	484	15.575	15.688	15.191	216.638	214.976	216.015
Jawa Barat	978	984	1.000	28.423	29.444	29.912	427.910	432.356	439.277
Jawa Tengah	972	983	1.026	25.817	25.711	24.622	383.011	383.561	396.463
D.I. Yogyakarta	208	207	205	6.725	6.620	6.535	72.556	72.919	73.264
Jawa Timur	1.176	1.184	1.187	31.195	31.702	30.294	405.302	407.301	407.627
Bali	170	171	157	6.265	5.010	5.746	70.831	69.938	65.087
Nusa Tenggara Barat	126	128	133	3.620	3.768	3.735	48.171	54.705	57.217
Nusa Tenggara Timur	156	154	152	3.262	3.443	3.339	69.169	51.086	51.323
Timor Timur	41	-	-	1.026	-	-	13.798	-	-
Kalimantan Barat	181	178	183	3.625	3.723	3.787	43.095	45.507	46.447
Kalimantan Tengah	110	111	113	1.959	2.057	2.030	21.891	25.595	25.299
Kalimantan Selatan	97	101	126	2.923	2.767	3.142	34.021	34.461	40.107
Kalimantan Timur	143	145	148	3.130	3.073	2.877	36.566	38.469	40.257
Sulawesi Utara	207	209	192	4.042	4.018	3.786	52.146	49.659	48.412
Sulawesi Tengah	99	99	101	2.411	2.496	2.397	24.464	27.675	29.342
Sulawesi Selatan	374	373	343	10.487	10.445	10.218	124.103	129.740	130.928
Sulawesi Tenggara	84	81	86	1.940	1.961	2.156	30.813	33.077	36.398
Maluku	158	156	176	3.655	3.522	3.580	48.509	49.813	46.935
Irian Jaya	107	105	116	2.579	2.642	2.503	31.254	33.671	35.646
Indonesia	7.936	7.900	7.980	214.150	215.676	210.718	2.838.085	2.896.864	2.938.514

Sumber: 1. Departemen Pendidikan Nasional/ Ministry National Education
 Source 2. Statistik Indonesia, BPS 2001

Tabel 8
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut golongan umur dan status sekolah
Percentage of population aged 5 years and over by age group and school attendance
2001

Golongan Umur Age Group	Kota / Urban			Pedesaan / Rural			Kota + Pedesaan / Urban + Rural		
	Tidak/Belum pernah sekolah No Schooling	Masih sekolah Attending school	Tidak Sekolah lagi Not attending school anymore	Tidak/Belum pernah sekolah No Schooling	Masih sekolah Attending school	Tidak Sekolah lagi Not attending school anymore	Tidak/Belum pernah sekolah No Schooling	Masih sekolah Attending school	Tidak Sekolah lagi Not attending school anymore
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 - 9	31,97	67,72	0,31	37,14	62,49	0,37	35,11	64,54	0,34
10 - 14	0,39	95,41	4,20	1,27	89,60	9,13	0,92	91,92	7,17
15 - 19	0,57	62,05	37,38	1,95	38,59	59,46	1,31	49,39	49,30
20 - 24	0,61	16,34	83,04	2,64	2,46	94,90	1,64	9,32	89,04
25 - 29	0,97	2,29	96,74	3,87	0,30	95,83	2,52	1,23	96,25
30 - 34	1,87	0,69	97,43	6,27	0,14	93,59	4,25	0,39	95,35
35 - 39	3,73	0,54	95,73	10,61	0,22	89,18	7,56	0,36	92,08
40 - 44	5,45	0,48	94,07	14,46	0,17	85,37	10,50	0,31	89,20
45 +	19,32	0,12	80,06	37,02	0,03	62,95	30,10	0,06	69,83
Jumlah/Total	8,59	26,87	64,54	16,60	23,19	60,21	13,13	24,38	62,09

Catatan / Note : Berdasarkan Susenas 2001 / Based on 2001 National Socio Economic Survey

- 1) Tidak termasuk D.I. Aceh / Excluding D.I. Aceh
2. Statistik Indonesia, BPS 2001